



*Visi*

*Kedaulatan Pangan Indonesia*

Tahun 2014-2024

Usulan Pokok-Pokok Pemikiran  
Untuk Pembangunan Pertanian dan Pedesaan

# **VISI KEDAULATAN PANGAN INDONESIA**

## **TAHUN 2014-2024**



**SERIKAT PETANI INDONESIA**

---

Usulan Pokok-Pokok Pemikiran Untuk Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan

## Mukadimah

**K**emiskinan, seperti juga kelaparan, masih menjadi masalah utama di pedesaan. Para penduduk di pedesaan yang memproduksi pangan, justru merupakan pihak yang banyak menderita kelaparan dan kemiskinan. Di dunia yang memproduksi cukup pangan untuk memberi makan seluruh penduduk dunia ini, lebih dari 700 juta jiwa yang tinggal di pedesaan terus menderita kelaparan. Di Indonesia, sekitar 29 juta jiwa masih berada di bawah garis kemiskinan (BPS) dan mayoritas (18 juta jiwa) berada di pedesaan.

Menurut penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), 80 persen dari penduduk dunia yang menderita kelaparan ternyata tinggal di daerah pedesaan. Dari 1 milyar orang yang menderita kemiskinan ekstrim di dunia, 75 persen tinggal dan bekerja di daerah pedesaan. Situasi ini diperparah oleh krisis pangan global pada tahun 2008 dan 2009. Hari ini, 50 persen dari penduduk dunia yang kelaparan adalah petani kecil yang bergantung keseluruhan atau sebagian pada pertanian untuk mata pencaharian mereka. Hal ini juga berlaku di Indonesia. 20 persen dari mereka yang menderita kelaparan adalah keluarga tak bertanah yang bertahan hidup sebagai petani penyewa atau buruh tani dengan bayaran rendah yang harus berpindah dari satu pekerjaan informal ke pekerjaan lain. Dan 10 persen dari penduduk dunia yang kelaparan adalah mereka yang hidup sebagai nelayan tradisional, pemburu dan meramu, dan penggembala di komunitas pedesaan. Sebanyak 70 persen dari penduduk dunia yang kelaparan adalah perempuan dan sebagian besar dari mereka bekerja di bidang pertanian.

Sektor pertanian merupakan jantung kehidupan pedesaan. Selain berfungsi sebagai penjamin kedaulatan pangan bangsa,

sektor ini juga telah menjadi tulang punggung kekuatan ekonomi nasional. Namun, pembangunan secara umum masih berorientasi pada pertumbuhan tanpa memperdulikan proses distribusi kesejahteraan yang semakin timpang. Paradigma pembangunan yang berorientasi pertumbuhan telah membawa kondisi pertanian dan pedesaan Indonesia menjadi terpuruk. Padahal, pedesaan dan pertanian merupakan dua wilayah vital dalam pembangunan.

Sementara itu, kondisi pertanian yang berkembang dewasa ini sejak praktik revolusi hijau (1970-an) telah mengancam keselamatan hidup petani, memperburuk kondisi alam, menurunkan kemampuan produktivitas petani dan kesejahteraan hidup petani. Permasalahan ekonomi yang menyangkut masalah pertanian, pelayanan kesehatan, dan pendidikan adalah realitas yang menunjukkan belum terpenuhinya hak rakyat pedesaan atas hak-hak ekonomi, sosial dan budaya seperti apa yang telah ditegaskan dalam kovenan internasional yang dikeluarkan oleh PBB sejak tahun 1966.

Pertanian dan pedesaan telah menjadi tidak atraktif, sehingga petani dan rakyat yang bekerja di pedesaan—serta pedesaan itu sendiri—dianggap kusam, miskin, dan terpinggirkan. Hal inilah yang harus menjadi fokus pekerjaan Indonesia, demi kesejahteraan rakyat tani Indonesia serta pembangunan daerah pedesaan.

## **Tujuan Visi Kedaulatan Pangan**

*“Pengentasan kemiskinan dan pembangunan pedesaan”*

## **Arah Dan Sasaran**

Visi Kedaulatan Pangan Indonesia 2014-2024 harus diarahkan pada :

1. Pengurangan angka kemiskinan secara gradual di pedesaan hingga 50 persen sehingga menjadi sekitar 9 juta jiwa pada tahun 2024;
2. Peningkatan daya beli rakyat pedesaan secara gradual hingga Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai angka 125 pada tahun 2024;
3. Penurunan rasio ketimpangan secara nasional, sehingga Indeks Gini Indonesia tidak lebih dari 0.3;
4. Peningkatan pembangunan dan atraktivitas ekonomi pedesaan yang ditandai dengan peningkatan investasi dalam negeri sebesar 15 persen tahun dan rerata umur petani dan rakyat Indonesia yang bekerja di pedesaan semakin muda, dari 52 tahun (saat ini) menjadi 40 tahun pada 2024. Urgensi peningkatan anggaran pertanian dan pembangunan pedesaan di APBN secara gradual menjadi 15% di tahun 2024;
5. Meningkatkan produksi pangan nasional untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan terutama untuk mengurangi ketergantungan impor. Sasaran untuk poin ini adalah minimum kuota produksi untuk beras, gula, garam, minyak goreng, susu, kedelai dan daging sapi. Sasaran ini juga harus diselaraskan dengan pengurangan gradual impor pangan di Indonesia (beras swasembada tahun 2018, gula dari 40 persen menjadi 10 persen tahun 2024, kedelai dari 65 persen menjadi 25 persen di tahun 2018, garam dari 70 persen menjadi 35 persen di

tahun 2020, susu dari 70 persen menjadi 35 persen di tahun 2022 dan swasembada jagung pada tahun 2017);

6. Meningkatnya akses petani gurem terhadap kepemilikan lahan pertanian dari rata-rata 0.3 hektar menjadi 2.0 hektar per KK tani; dan
7. Meningkatnya jumlah koperasi dan menguatnya lembaga koperasi petani, nelayan dan rakyat pedesaan lain dan unit usaha pedesaan yang dimiliki dan dikelola oleh rakyat.

## **Strategi Kebijakan**

Kedaulatan Pangan Indonesia 2014-2024 ditempuh dengan pembangunan pertanian dan pedesaan melalui lima langkah pokok, yaitu:

1. Redistribusi lahan terhadap petani kecil/tak bertanah/petani gurem, buruh tani, masyarakat adat— dan juga redistribusi kawasan tangkap untuk nelayan kecil;
2. Pembangunan infrastruktur pedesaan, terutama irigasi dan akses transportasi: jalan, sungai, pesisir dan laut;
3. Pembangunan, pemuliaan dan pemajuan benih dari rakyat, termasuk benih lokal tradisional, pembangunan bank benih rakyat dan plasma nutfah;
4. Peningkatan kemampuan petani dan penguatan organisasi tani dan pola hubungan dengan pemerintah, terutama pelibatan aktif perempuan petani/pekerja sebagai tulang punggung kedaulatan pangan;

5. Peningkatan teknologi tepat guna, riset teknologi untuk pertanian dan pedesaan;
6. Peningkatan akses modal untuk petani dan rakyat yang bekerja di pedesaan; dan
7. Revitalisasi pasar tradisional dan strategi pengadaan dan cadangan pangan oleh pemerintah.

Ketujuh langkah diatas dilakukan dengan memperhatikan arah pembangunan pertanian yang didasarkan pada :

- Melakukan berbagai upaya untuk menempatkan petani serta masyarakat lokal sebagai pengelola kekayaan alam lokal dengan menjunjung tinggi kedaulatan dan kemandirian petani dengan : a) Mendasarkan pada latar kebudayaan dan sejarah yang berbeda-beda; b) Memegang teguh pengetahuan dan kearifan lokal; c) Memegang teguh nilai-nilai keadilan; d) Mengacu pada prinsip-prinsip dan perspektif pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan, adil, dan beradab; dan e) mengakui hak asasi terutama hak masyarakat adat
- Membangun perekonomian pedesaan melalui sistem koperasi yang berbasis kekayaan lokal dan memaksimalkan peran aktif masyarakat pedesaan dengan menggunakan prinsip: a) Gotong royong; b) Mengutamakan pembangunan sektor pertanian; c) Mengembangkan usaha tani dan kegiatan *off-farm* yang berbasis pada sektor pertanian; dan d) Membangun sistem ekonomi pedesaan yang mandiri dan berkelanjutan.
- Mengembangkan sistem pangan lokal yang berbasis proses dan produksi oleh petani yang diatur oleh unit-unit keluarga dengan teknologi yang murah dan dapat digunakan oleh rakyat kecil untuk menciptakan kedaulatan pangan



# Program

## 1. *Reforma agraria*

- Redistribusi 9.6 juta hektar lahan terlantar milik negara (data BPN)/ dengan kisah sukses 200,000 hektar SPI tahun 2007-2013. Dalam tahun pertama, pemerintah bersama organisasi rakyat bisa bekerja sama untuk redistribusi 1 juta lahan. Tahun berikutnya bisa sama atau meningkat sedikit. Identifikasi objek lahan oleh BPN bekerja sama dengan menteri terkait dan melibatkan organisasi rakyat, sementara identifikasi subyek *beneficiaries* bisa bersama organisasi rakyat. Dalam masa transisi 3 tahun, petani bisa membayar pajak atas tanahnya sendiri untuk masuk ke APBN. Indonesia juga harus melakukan perombakan dan penataan atas tata ruang dan wilayah, yang memperhatikan ketersediaan dan perlindungan lahan pertanian serta perlindungan kawasan hutan dan konservasi kekayaan alam—serta kepastian implementasi;
- Pencanaan program Indonesia Go Organic! dengan *pilot project* 1.000 desa organik dari program reforma agraria sebagai sentra produksi penghasil pangan organik hingga tahun 2019, dan tambahan 1.000 lagi hingga tahun 2024;
- Revitalisasi Komnas HAM: meningkatkan fungsi mediasi, juga menambah fungsi penyidikan (seperti yang dimiliki KPK). Pengadilan Ad Hoc untuk penyelesaian dan rekonsiliasi konflik agraria (mendesak: pengurangan gradual penyelesaian



konflik dari 2,817 konflik menjadi 500 di tahun 2024);

- Moratorium ekspansi perkebunan hingga 2024, terutama yang dimiliki oleh perusahaan raksasa, bermasalah (pajak, konflik sosial) dan tidak berkelanjutan secara ekologi; dan
- Pelaksanaan UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960, serta mengkaji UU turunan yang tidak sesuai dengan implementasi reforma agraria (misalnya: UU Kehutanan, UU Perkebunan).

## *2. Pembangunan infrastruktur pedesaan*

- Perbaiki irigasi teknis dan non-teknis di Indonesia (kerusakan 45 persen bisa dibetulkan semua hingga 2019) dan penambahan irigasi teknis sebanyak 60% hingga 2024;
- Pembangunan terminal-terminal baru untuk bongkar muat terutama di daerah terpencil dan tak lupa menggunakan sungai dan laut--terutama di bagian Timur Indonesia;
- Pembangunan rel kereta trans-Sumatera, trans-Sulawesi, trans-Kalimantan;
- Pembangunan akses jalan dan jalur transportasi air untuk 183 kabupaten tertinggal hingga tahun 2024.

## *3. Pembangunan, pemuliaan dan pemajuan benih*

- Peningkatan produksi benih hortikultura mandiri dari pedesaan hingga mencapai 14.300 ton pada tahun 2024;

- Penggalakan, pengadaan lumbung dan bank benih rakyat di setiap desa;
- Pencanangan 1.000 desa berdaulat benih hingga tahun 2019, dan 1.000 desa tambahan lagi hingga tahun 2024 sebagai purwarupa desa kedaulatan pangan;
- Festival benih unggul lokal, penghargaan terhadap pemulia per tahun dan pertukaran benih antarpetani.

4. *Peningkatan kapasitas, penguatan organisasi tani dan sinergi hubungan dengan pemerintah*

- Peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui pengembangan usaha tani penanganan pasca panen, mutu, pengolahan hasil dan pemasaran yang dikelola petani/ organisasi tani, dan pengembangan agroindustri di perdesaan;
- Mengangkat seluruh penyuluh pertanian di Indonesia menjadi PNS hingga tahun 2019; dengan tambahan 22.000 personel hingga tahun 2019 dan 28.000 lagi hingga tahun 2024 dengan sinergi bersama organisasi tani, nelayan dan rakyat pedesaan lain;
- Pengadaan Forum Tani yang beranggotakan seluruh organisasi tani nasional untuk musyawarah kebijakan pertanian dan pembangunan pedesaan; juga untuk membicarakan pola relasi lebih lanjut pemerintah-organisasi tani untuk 2014-2024;
- Pengembangan Koperasi Tani sebagai lembaga keuangan pedesaan dan sistem pendanaan yang layak bagi usaha pertanian, antara lain melalui

pengembangan dan penguatan koperasi tani, insentif permodalan bagi koperasi tani, serta pengembangan pola-pola pembiayaan yang layak dan sesuai bagi usaha pertanian dengan target 10.000 koperasi berbasis serikat kerja/organisasi tani dengan akses ke dana publik di berbagai serikat buruh, tani, nelayan, buruh migran;

- Tambahkan untuk "majelis rakyat" yang terdiri dari 15-20 keluarga di tiap desa (sesuai UU Desa) dan majelis yang aktif mendapatkan reward dana publik. Hingga 2017 diharapkan 50% dari dana publik di pemerintahan desa bisa diakses majelis-majelis ini
- Mengembangkan unit-unit usaha pengolahan dan pemasaran produksi pertanian dalam bentuk BUMN dengan melibatkan keluarga petani, koperasi petani maupun organisasi petani;
- Pendirian pusat pemasaran produk pertanian organik dalam bentuk Koperasi Petani serta melibatkan peran aktif organisasi tani, sebagai pusat sarana promosi pemasaran produk pertanian dalam negeri maupun luar negeri;
- Perencanaan spatial yang menghasilkan data potensi desa, komoditas dan produk unggulan, kompetensi inti sentra produksi, serta dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pembangunan Desa, dan Anggaran Penerimaan dan Belanja Desa secara transparan dengan melibatkan organisasi rakyat, koperasi dan "majelis rakyat";
- Kerja sama pemerintah daerah dengan pemerintah desa dan organisasi rakyat, koperasi dan "majelis

rakyat" untuk mendorong skema rantai nilai yang menyangkut industri pengolahan, pelayanan teknis, manajemen informasi yang efektif dan efisien dan pasar.

*5. Peningkatan teknologi tepat guna dan riset pertanian*

- Peningkatan anggaran untuk riset di bidang pertanian (dari rata-rata Rp1 triliun di tahun 2014 menuju Rp5 triliun di tahun 2024--dengan fokus pada teknologi tepat guna yang langsung bisa bermanfaat bagi petani terutama produk pangan: benih dan moda agroekologi/pertanian berkelanjutan;
- Terkait Gerakan Indonesia Go Organic! perlu ditingkatkan teknologi tepat guna di pedesaan seperti biomassa dan biogas. Perlu dibangun proyek percontohan 100 desa mandiri energi per tahun hingga 2024;
- Menggalakkan sumber energi terbarukan dan teknologi pembangkit listrik mikro (air, angin, surya) juga biomassa serta biogas, disandingkan dengan desa mandiri energi di atas (perlu survey di mana energi air, surya, angin untuk realisasi).

*6. Peningkatan akses modal dan perlindungan sosial*

- Pengadaan Bank Tani sebagai mandat UU Desa untuk penyaluran Kredit Usaha Rakyat untuk mencapai 80 persen desa di seluruh Indonesia;
- Asuransi pertanian dan usaha rakyat sebagai mandat UU Perlindungan Petani terutama untuk

resiko perubahan iklim, gagal panen akibat hama dan bencana alam;

- Pembahasan hak asasi petani dan rakyat yang bekerja di pedesaan di dalam UU Perlindungan Petani, serta ide upah minimum petani di tahun 2019;
- Gratis asuransi kesehatan untuk seluruh petani dan rakyat yang bekerja di pedesaan bersama keluarganya selambat-lambatnya tahun 2019;
- Pengembangan kewirausahaan pertanian, terutama bagi angkatan kerja muda pedesaan melalui pendidikan dan akses permodalan;
- Gratis pendidikan 12 tahun untuk seluruh petani dan rakyat yang bekerja di pedesaan tahun 2019— dengan jaminan beasiswa untuk perguruan tinggi bagi peserta didik berprestasi;
- Perluasan sumber pembiayaan bagi usaha tani dan koperasi tani, dan peningkatan peran lembaga keuangan bukan bank, disertai dengan pengembangan jaringan informasinya;
- Pelayanan satu atap untuk memudahkan kegiatan perekonomian pedesaan;
- Penyebaran lembaga keuangan mikro terutama di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara dan Papua--bisa menggandeng terutama BUMN (dan swasta).

*7. Revitalisasi pasar tradisional dan strategi pengadaan dan cadangan pangan oleh pemerintah*

- Modernisasi/penambahan daya saing pasar tradisional setidaknya 250 pasar tradisional dalam setiap tahunnya
- Kreasi proyek pasar petani di 100 kota/ibukota kabupaten (untuk memasyarakatkan produk organik, direct selling-menghubungkan petani dengan konsumen langsung, dengan cara festival, juga menarik wisata)
- Pengembangan jaringan pemasaran lokal, regional, nasional serta internasional untuk produksi pertanian yang dilakukan dan dikelola oleh koperasi-koperasi tani.
- Pengembangan BUMN pertanian yang menunjang produksi subsektor hulu (pasokan input), *on farm* (budidaya), hilir (pengolahan), pemasaran serta jasa penunjang lainnya, dengan penyertaan koperasi-koperasi tani.
- Bulog kembali menjadi lembaga untuk kendali harga dan *bufferstock* serta memiliki public service obligation; serta menangani komoditas strategis seperti beras, kedelai, gula—dengan penetapan harga pembelian pemerintah atas (*ceiling*) dan minimal (*floor*) ditetapkan bersama dengan Forum Tani.



DEWAN PENGURUS PUSAT  
SERIKAT PETANI INDONESIA  
Jl. Mampang Prapatan XIV No.5, Jakarta Selatan  
Telp/ Fax : 021 - 7991890/ 021 - 7993426